

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita BPK Pusat

Halaman 1 dan 15

# Korupsi Parpol Tetap Bisa Terjadi (1)

## Bantuan dari Negara Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan dana bantuan bagi partai politik belum tentu akan membebaskan parpol dan anggotanya dari korupsi. Pasalnya, selain tidak diiringi oleh ketentuan yang ketat tentang transparansi dan akuntabilitas, bantuan itu belum cukup membiayai seluruh aktivitas parpol.

Melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol yang sedang dilakukan, besar bantuan keuangan untuk parpol akan dinaikkan dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk tiap satu suara.

Dengan penghitungan itu, sebagai contoh, PDI-P, sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan 23,68 juta suara, bisa memperoleh bantuan keuangan dari negara Rp 23,68 miliar setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih besar daripada yang diterima saat ini, yaitu Rp 2,55

miliar per tahun.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Rabu (5/7), di Jakarta, menuturkan, penambahan dana bantuan untuk parpol itu sesuai dengan kajian KPK. Kesimpulan kajian itu adalah perlu ada dukungan dana bagi parpol untuk mengurangi risiko korupsi di lingkungan parpol.

Namun, dalam penambahan dana bantuan ini, KPK mensyaratkan tiga hal agar pencegahan

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 1 dan 15

## Korupsi Parpol Tetap Bisa Terjadi (2)

(Sambungan dari halaman 1)

korupsi di parpol bisa berlangsung efektif. Pertama, nilai bantuan dana parpol itu harus disesuaikan dengan iuran anggota. Dengan demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya bisa mengaudit penggunaan dana bantuan parpol dari negara, tetapi juga memeriksa kesesuaian dana yang masuk dari iuran anggota.

Kedua, ada kode etik dan mahkamah etik di internal parpol. Mahkamah etik ini berperan sebagai mekanisme kontrol parpol, yang antara lain termasuk mengawasi kader dan elite parpol.

Sementara, syarat ketiga, parpol mesti melakukan perekrutan kader secara terbuka dan transparan. Selama ini, parpol dinilai gagal melakukan perekrutan dan pendidikan politik. Akibatnya, kader yang diterima kurang memiliki kompetensi dan kualitas. "Penambahan dana bantuan ini untuk membangun parpol. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi anggota parpol yang masuk melalui jalur yang tidak jelas. Misalnya, kader-kader yang tiba-tiba muncul dan tidak ketahuan rekam jejaknya secara baik," papar Pahala.

Apabila tiga syarat perbaikan tata kelola parpol yang disyaratkan KPK itu tidak dipenuhi di dalam peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang penambahan dana parpol, menurut Pahala, yang terjadi hanyalah pemborosan anggaran. Kebijakan penambahan anggaran tersebut juga tidak akan efektif mencegah terjadinya korupsi di parpol dan kadernya.

Ironisnya, lanjut Pahala, ketiga syarat KPK itu ada kecenderungan tidak dipenuhi pemerintah dalam kebijakan kenaikan dana bantuan untuk parpol.

### Belum cukup

Potensi korupsi di parpol juga tetap terbuka karena kenaikan dana bantuan parpol itu belum cukup membiayai seluruh kegi-

atan parpol.

Dari data kajian yang dihimpun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, pada 2016 kebutuhan anggaran PDI-P adalah Rp 507 miliar. Sementara Golkar membutuhkan Rp 395 miliar dan Gerindra butuh Rp 316 miliar. Sementara, dengan bantuan sebanyak Rp 1.000 setiap suara, bantuan yang diterima PDI-P dari negara Rp 23,68 miliar, Golkar mendapat Rp 18,43 miliar, dan Gerindra memperoleh Rp 14,76 miliar.

Untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, sejumlah parpol membuat beberapa kebijakan, seperti memotong sebagian gaji kadernya yang menjadi anggota legislatif untuk dimasukkan di kas parpol.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, partainya juga menerima sumbangan dari pihak tertentu yang besarnya maksimal Rp 1 miliar setiap tahun dan meminta kader untuk iuran yang besarnya minimal Rp 10.000.

Dari iuran kader itu, sebanyak 50 persen untuk kepentingan pendidikan politik parpol, 20 persen untuk manajemen parpol, 20 persen untuk pemenangan pemilu, dan 10 persen untuk pemberdayaan perempuan di parpol.

Hasto menegaskan, PDI-P melaporkan keuangannya kepada publik secara berkala. Sumber dana yang berasal dari bantuan negara dan hasil iuran kader bisa dibuka ke publik. Namun, sumber yang berasal dari pihak tertentu belum tentu seluruhnya dapat diungkap.

"Soal sumbangan memang ada yang perlu dirahasiakan sesuai permintaan yang memberi. Namun, yang pasti, besar dan sumbernya tetap sesuai undang-undang," kata Hasto.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menambahkan, dana bantuan dari pemerintah tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar pembinaan dan kaderisasi untuk

partai politik. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan dana itu dapat ditekan.

"Notabene hanya untuk kaderisasi. Kalau untuk beli mobil, tidak boleh, beli gedung tidak boleh. Dana ini juga harus bisa diaudit oleh auditor independen, bisa disampaikan ke KPU, dan bisa diakses publik," tutur Agus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keyakinannya bahwa internal parpol sudah terlatih untuk bersikap transparan dan akuntabel.

### Tidak sesuai

Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, menuturkan, mengutip dari laporan BPK, sering kali laporan pertanggungjawaban keuangan parpol tidak lengkap dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Terkait hal itu, menurut mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, perlu ada aturan yang bisa memperketat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterima parpol. Jika pertanggungjawabannya tidak jelas, parpol mesti mendapat sanksi.

Selain kenaikan dana bantuan dari pemerintah pusat, lanjut Hadar, juga harus diperhatikan bantuan yang diterima parpol dari daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini karena parpol di daerah, yang terdiri dari parpol nasional dan parpol lokal, juga mendapat bantuan dana dari APBD.

Masalahnya, lanjut Hadar, jika besar bantuan untuk parpol di tingkat nasional sudah pasti jumlah besarnya, di level daerah tidak ada standar yang sama. "Di daerah tidak ada standarnya, tergantung kesanggupan daerah. Kini, saatnya semua itu kini harus diatur dengan jelas dan ketat," ujarnya.

(REK/IAN/SAN/AGE/GAL/MHD)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di [kompas.id](http://kompas.id)